

## **JAWABAN TUGAS 2**

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kode/Nama MK : **SOSI4303.4/Sosiologi Pedesaan 4**  
Tugas : 2

### **Pertanyaan 1/2:**

*Kelembagaan di Desa mengacu pada wadah yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Pemerintahan Desa, keberadaan lembaga desa berperan sebagai wadah untuk mengemban tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat desa. Menurut Saudara, apa yang menyebabkan lemahnya kelembagaan pemerintahan desa saat ini? Bagaimana kelembagaan desa dapat berkembang dengan baik? Berikan jawaban dengan analisis Sosiologi.*

### **Jawaban 1/2:**

Dari perspektif sosiologis, lemahnya kelembagaan dalam pemerintahan desa dapat ditinjau baik secara struktural maupun secara sosial. Upaya penguatan dapat dilakukan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendidikan dan berbagai upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta memastikan partisipasi semua pihak, transparansi dalam penyelenggaraan berbagai program kegiatan, dan akuntabilitas pembiayaan. Harus dipahami bahwa penguatan kelembagaan pemerintah desa tidak dapat dilakukan dengan membuat generalisasi, yaitu dengan menetapkan satu solusi untuk semua persoalan yang ada— seperti pakaian “*all size*” yang cocok untuk semua ukuran – melainkan harus dicari solusi yang unik, dengan ke-ikut-serta-an sepenuhnya dari warga, sesuai dengan kondisi sosial-budaya lokal di komunitasnya. Jadi, memahami penyebab lemahnya kelembagaan pemerintahan desa memerlukan pendekatan struktural, ekonomi dan sosial-budaya yang komprehensif, dengan memanfaatkan sumber-daya yang tersedia dan melibatkan semua pemangku-kepentingan (*stake-holders*). Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh penyebab dari lemahnya kelembagaan pemerintahan desa, serta upaya-upaya untuk memperbaikinya.

1. **Kurangnya partisipasi aktif warga.** Pemerintahan desa menjadi lemah karena kurangnya partisipasi aktif dari warga masyarakat desa. Program-program yang hanya diturunkan dari “atas” yang bersifat instruksional sering dilaksanakan tanpa sosialisasi yang baik, dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Sebenarnya ada mekanisme “*musrenbang*” (musyawarah rencana pembangunan) untuk menggali aspirasi dari masyarakat, tapi seringkali tidak efektif untuk masyarakat pedesaan. Untuk meng-efektif-kan forum-forum seperti ini, perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk tokoh-tokoh masyarakat setempat (*training for trainers*) agar dapat menjadi motivator bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai forum mustawarah desa. Perlu juga diperhatikan ke-ikut-

serta-an kelompok-kelompok minoritas, seperti “*emak-emak*”, kelompok-kelompok anak-muda dan lansia, serta kelompok-kelompok minoritas lainnya jika ada.

2. *Lemahnya edukasi, sosialiasi dan penyampaian informasi*. Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umumnya berjalan satu arah, dalam bentuk instruksi, misalnya instruksi untuk kerja-bakti, upacara bendera, dan lain-lain, yang minim sosialiasi, apalagi edukasi. Masyarakat pedesaan seyogyanya diberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum diberikan instruksi.
3. *Rendahnya kapasitas aparat pemerintahan desa*. Terutama di wilayah-wilayah terpencil, pemerintahan desa kekurangan aparat yang memadai kapasitasnya. Untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa, harus dilakukan investasi, berupa pendidikan dan pelatihan, penempatan SDM yang tepat, *tour of duty* (mutasi dan promosi) yang rutin dan teratur, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjaga konektivitas dengan wilayah-wilayah lain, baik sesama wilayah pedesaan mau pun dengan wilayah perkotaan.
4. *Sentralisasi yang terlalu kuat, pengawasan yang lemah*. Kelembagaan pemerintahan desa mengalami pelemahan karena kurangnya otonomi, akibat sentralisasi administrasi yang terlalu kuat, di samping lemahnya pengawasan yang mengakibatkan lemahnya akuntabilitas. Dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintahan desa, akan terjadi desentralisasi dan peningkatan peran pemerintahan desa untuk dapat menentukan sendiri berbagai kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Otonomi yang lebih luas juga akan membuat meningkatnya akuntabilitas, karena pengawasan yang lebih kuat dapat dilaksanakan oleh masyarakat desa secara mandiri, tidak bergantung pada supervisi dari pusat.

Masih banyak hal-hal lain yang menjadi sebab lemahnya kelembagaan di pemerintahan desa. Misalnya di suatu desa ada kendala-kendala sosial ekonomi seperti kemiskinan dan kelangkaan sumber daya alam seperti air untuk pengairan atau air bersih. Kendala-kendala sosial-ekonomi juga bisa menimbulkan ketidak-adilan yang menyebabkan marginalisasi sebagian masyarakat, ketidak-percayaan pada pemerintahan (yang dirasakan selalu berpihak pada yang kuat, tidak berpihak pada yang lemah) yang ujung-ujungnya menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif, dan menjadi lemah. Kendala-kendala sosial-ekonomi seperti ini sebaiknya dicari akar masalahnya, untuk diselesaikan dengan sebagik-baiknya. Sebagai contoh nyata, misalnya, ada teman-teman dari Fakultas Teknik dari sebuah universitas, merancang dan membuat alat yang disebut “*ATM Beras*”, sehingga warga masyarakat yang akan mengambil “jatah” pembagian beras,

dapat mengambil sendiri berasnya tanpa harus tergantung pada aparat desa, yang sering tidak adil dalam membagikan beras.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mengakibatkan lemahnya kelembagaan pemerintahan desa banyak cara yang bisa ditempuh, dengan senantiasa mengedepankan konsep partisipatif dengan mengikut-serta-kan warga masyarakat, membina para tokoh yang disegani dan dihormati dalam masyarakat tersebut, memperhatikan “konteks lokal” yang relevan, serta selalu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam prosesnya.

#### Pertanyaan 2/2:

*Salah satu kelembagaan di desa yaitu Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), yang tujuannya adalah sebagai Lembaga yang meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan Masyarakat. Mengapa banyak Bumdes hari ini yang tidak berkembang bahkan gagal? Bagaimana Saudara melihat fenomena ini secara sosiologis? Jelaskan. Berikan contoh kasus dan jawaban dengan analisis Sosiologi.*

#### Jawaban 2/2:

Salah satu penyebab utama dari kegagalan pengembangan kelembagaan BUMDes di kebanyakan wilayah pedesaan adalah tidak berkembangnya iklim ke-wira-usaha-an (*entrepreneurship*) di kalangan masyarakat desa. Suatu badan usaha apa pun, hanya akan berkembang dengan baik jika para pengelola-nya memiliki jiwa ke-wira-usaha-an. Tanpa jiwa ke-wira-usaha-an, maka usaha apa pun tidak akan membuahkan hasil (keuntungan), sehingga pada akhirnya akan bangkrut dan merugi.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, ke-wira-usaha-an sulit berkembang di wilayah pedesaan karena banyak faktor, baik faktor struktural, ekonomi dan sosial-budaya, antara lain, misalnya;

1. *Keterbatasan infrastruktur*, seperti sarana-prasarana transportasi dan telekomunikasi sehingga menyulitkan bagi masyarakat desa untuk membangun jejaring (*network*) pemasaran.
2. *Keterbatasan akses ke sumber finansial*, seperti perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan.
3. *Kebijakan yang tidak adil*, meng-anak-tiri-kan ke-wira-usaha-an di wilayah pedesaan dan lebih banyak mengupayakan pengembangan ke-wira-usaha-an di wilayah perkotaan.
4. *Terbatasnya pasar*, karena populasi wilayah pedesaan yang tidak padat seperti masyarakat di kota, maka pasar untuk produk pun terbatas jika hanya di sekitar wilayah pedesaan.
5. *Ketergantungan pada usaha tani*, sulit mengembangkan jenis-jenis usaha lain yang non-pertanian, karena kesulitan sumber daya.

6. *Cara berfikir tradisional*, yang selalu menghindari risiko dan mengutamakan kestabilan daripada inovasi.
7. Hampir *tidak ada contoh teladan* dari wira-usaha-wan desa.
8. *Kurangnya lembaga pendidikan dan pelatihan*, yang kebanyakan ber-lokasi di kota, sehingga terjadi “*brain drain*”, karena SDM yang meninggalkan desanya untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di kota, tidak pernah kembali ke desanya.

Sebagai contoh, diberitakan (lihat Gambar 1) bahwa ribuan BUMDes telah “mangkrak” karena usahanya tidak berkembang, sehingga mengalami kerugian dan bangkrut. Dari 45,000 unit,



Gambar 1

Berita Mangkraknya Ribuan BUMDes

Sumber: <https://www.panggungharjo.desa.id/ribuan-bumdes-mangkrak-karena-usaha-tidak-berkembang/>

sekitar sepertiganya tidak aktif. Menurut nara-sumber dalam berita tersebut, kegagalan ini pada umumnya disebabkan oleh ketidak-selarasan antara potensi yang ada dengan usaha yang dijalankan. Dari 30,000 yang dilaporkan aktif pun, sebagian besar tidak berjalan dengan baik dan belum ada yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kegagalan ini dalam perspektif sosiologis pastinya disebabkan oleh berbagai kendala struktural, sosial-budaya dan ekonomi, terutama karena tidak berkembangnya iklim wira-usaha di wilayah pedesaan seperti di wilayah perkotaan.

## REFERENSI

- [1] **Rahardjo**, “*Sosiologi Pedesaan*”, **Modul 1 – 9, SOSI4303**, Edisi 3, [Agustus **2023**], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android, <https://OpenAI.com> , <https://ChatGPT.com>